

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRAK

Risfa Oktrina, 1610842010, Implementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020. Dibimbing oleh: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA., dan Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 171 halaman dengan referensi 10 buku teori, 4 buku metode, 2 tesis, 6 jurnal, 14 dokumen pemerintah, 6 peraturan perundang-undangan dan 3 website internet.

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas terutama pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatur bagaimana pengisian JPT ini dilakukan dengan sistem merit. Padang Panjang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pengisian JPT Pratama di lingkungan pemerintahannya melalui *job fit* dan seleksi terbuka pada tahun 2019. Dalam survei awal yang peneliti lakukan, terdapat indikasi bahwa Kota Padang Panjang telah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengisian JPT Pratama di lingkungan instansi pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 yang dilakukan oleh implementor sehingga terlaksana dengan baik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan ini adalah teori George Edwards III dengan empat variabel utama yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengisian JPT Pratama di Kota Padang Panjang tahun 2019 berjalan dengan baik disebabkan adanya faktor komunikasi yang baik dan jelas dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu adanya kriteria dalam pemilihan implementor sehingga SDM yang melakukan kebijakan ini berkualitas. Kemudian Kota Padang Panjang memiliki anggaran yang mencukupi sehingga membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemberian insentif. Adapun faktor lain yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah adanya komitmen serta kriteria Walikota Padang Panjang dalam pemilihan pejabat hasil seleksi, sehingga mengurangi resiko pemilihan pejabat hanya karena kepentingan politik. Selanjutnya terdapat koordinasi antara implementor serta pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ABSTRACT

Risfa Oktrina, 1610842010, Policy Implementation for the Filling of Pratama High Leadership Positions in Padang Panjang Municipality in 2019, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2020. Supervised by: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA, and Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si. This thesis consists of 171 pages with references to 10 theoretical books, 4 method books, 2 master theses, 6 journals, 14 government documents, 6 legislations, and 3 internet websites.

To improve the quality of the State Civil Apparatus (ASN) especially in High Leadership Positions (JPT), so the government has established various policies to regulate how this JPT is filled with a merit system. Padang Panjang is one of the cities in West Sumatra Province which filled the Pratama High Leadership through job fit and open selection in 2019. At the beginning of this research, there are indications that Padang Panjang Municipality has implemented this policy under the regulations. This study aims to describe and analyze how the filling of Pratama High Leadership position in Padang Panjang Municipality was implemented by the implementor in 2019, so it was successfully implemented.

This research was conducted by qualitative descriptive methods and data collection techniques through interviews and documentation. For data validity techniques used source triangulation. The theory used to analyze this policy is George Edwards III's theory with four main variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, to determine the success and the failure of policy implementation.

The results of this study show that the policy implementation for the filling of Pratama High Leadership position in Padang Panjang Municipality in 2019 was successfully implemented, this happens because of good and clear communication factors in implementing this policy. After that, there are criteria in the selection of implementors, so that the human resources have a good quality. Then, Padang Panjang Municipality has a sufficient budget to provide facilities and incentives. Another factor that influences the success of the implementation of this policy is the commitment and criteria the Mayor of Padang Panjang Municipality in selecting candidates, thus reducing the selection of candidates just because of political interest. And also there is coordination between the implementor and interest group in implementing this policy.

Keywords: *Policy Implementation, The Filling of Pratama High Leadership Position*